

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN – I



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I KINERJA	1
A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansial	1
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	17
A. Permasalahan	17
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	18
BAB III PENUTUP	24
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

Hasil capaian kinerja sasaran secara umum menunjukkan peningkatan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan target pada triwulan I. Capaian pada triwulan I merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja dan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhir kata, kami berharap melalui Laporan Kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang. sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 10 April 2025

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DINAS P3A-PPKB	
SEK/KABID	Sp
KA. SUB BAG/SEKSI	-
PELAKSANA	Sp

Mengetahui :

1. Kabid 1 : Sp
2. Kabid 2 : Sp
3. Kabid 3 : Sp
4. Kabid 4 : Sp
5. Kabid 5 : Sp
6. Kepala LPT PPA : Sp

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

Hasil capaian kinerja sasaran secara umum menunjukkan peningkatan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan target pada triwulan I. Capaian pada triwulan I merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja dan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhir kata, kami berharap melalui Laporan Kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang. sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 10 April 2025


KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

BAB I
KINERJA

A. Target Indikator Kinerja Utama

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 Triwulan I serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat Target Tahun 2025 masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Target 2025
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam Pembangunan	(Indeks)
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,96
2.	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	(Kab/kota)
	- Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	14
3.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	(persen)
	- Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100

		(indeks)
4.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak	67,55
	- Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
		(persen)
	- Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	65

5.	Meningkatkan kualitas keluarga	(persen)
	- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,36
	- Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,24

6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	(skor)
		BB

B. Capaian Indikator Kinerja

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Capaian Triwulan I		
					Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,96	81,96	79,99	97
2	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	Kab /kota	14	0	0	0
3	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100	95	100	105,26
4	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	nilai	67,55	67,55	67,55	100

		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	65	65	65	100
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	64,36	64,36	62,55	96,90
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TF R per WUS usia 15-49 Tahun	2,24	2,24	2,26	99,11
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	A	112,5%
Total skor: 710,77 Rata-rata: 88,846%							

C. Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.263.289.551,35
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.728.239.977,35
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.130.252.102,35
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.501.248,67
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.153.700,00
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.135.246,67
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.212.302,00
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.450.363.034,00
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.409.336.769,00

2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.161.500,00
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35.864.765,00
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.488.400,00
2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.488.400,00
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000,00
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.000.000,00
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.069.082.911,68
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.295.000,00
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	355.167.000,00
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.600.000,00
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.636.894,20
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.359.417,48
2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	95.024.600,00
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.038.415.000,00
2.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	871.015.000,00
2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.400.000,00
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.876.627.608,00
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.248.700,00
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.367.908,00
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.619.011.000,00
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.773.900,00
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.296.400,00
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.735.200,00
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214.742.300,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	949.722.360,02
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	120.374.002,02

2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	48.356.000,00
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	38.495.000,00
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	33.523.002,02
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	812.254.998,00
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	711.514.000,00
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	100.740.998,00
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	17.093.360,00
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	17.093.360,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	455.591.583,00
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	96.237.533,00
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	19.316.038,00
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	76.921.495,00
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	226.641.000,00
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	86.000.000,00
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	140.641.000,00
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	132.713.050,00

2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	113.197.000,00
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	19.516.050,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5.634.940,00
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	5.634.940,00
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	5.634.940,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	105.325.611,00
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	105.325.611,00
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	31.956.518,00
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	73.369.093,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	288.313.810,00
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	103.527.361,00
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	25.742.995,00
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	77.784.366,00
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	184.786.449,00
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	140.693.240,00
2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	44.093.209,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	793.399.570,98
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	314.766.070,98
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	112.126.000,00

2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	202.640.070,98
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	478.633.500,00
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	121.638.500,00
2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	356.995.000,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	535.049.574,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	34.807.869,00
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	34.807.869,00
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	34.807.869,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	218.813.277,00
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	200.000.000,00
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	200.000.000,00
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	18.813.277,00
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	18.813.277,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	281.428.428,00
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	281.428.428,00
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	281.428.428,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		17.263.289.551,35

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIMULAN

17.263.289.551,35

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan I adalah:

1. Perlunya kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.
2. Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses bagi perempuan dalam pembangunan, memperoleh pendidikan dan pelatihan.
3. Aplikasi SIGA dalam pemeliharaan sampai saat ini.
4. Data terpilah dari SOPD belum tersedia.
5. Kurangnya kapasitas SDM pada unit layanan di Kabupaten/Kota yang membutuhkan tenaga profesional yang memiliki sertifikat keahlian terutama yang berkaitan dengan hal mediasi dan konseling;
6. Kurang maksimalnya unit layanan pada kabupaten/kota;
7. Petugas Operator Simfoni PPA Kabupaten/ Kota masih belum sepenuhnya meng input layanan yang diberikan kepada korban ke Simfoni PPA;
8. Kurangnya Anggaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
9. Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam pemenuhan hak anak yang dituangkan dalam 5 klaster 1 kelembagaan, yang tertuang dalam 24 indikator kabupaten/kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak anak.
10. Belum semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mendapatkan KLA. Di tahun 2023 ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan KLA, 4 (empat) Kabupaten mendapat predikat pramata (Kapuas, Katingan, Kotim, dan Sukamara) dan 2 (dua) kab dan 1 (satu) kota yang mendapat predikat Madya (Palangka Raya, Pulang Pisau, dan Kobar).
11. SDM di Kab/kota yang mengalami mutasi dan kekurangan tenaga SDM yang memahami KLA.
12. SDM dari belum memiliki sertifikat KHA.
13. Minimnya fasilitasi atas informasi layak anak.

14. Kurangnya sosialisasi terkait FAD sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).
15. Dukungan anggaran yang kecil dari pemerinath kabupaten/kota untuk pelaksanaan KLA di Kabupaten/Kota.
16. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak.
17. Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan belum optimalnya peran kelembagaan Perlindungan Hak Anak .

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha dan inovasi.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan IV Tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah perlu upaya – upaya dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

B. Tindaklanjuti

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
2. Perlunya dukungan, advokasi dan anggaran dalam pencapaian target di Kalimantan Tengah, terutama dalam Peningkatan Perekonomian Perempuan.
3. Kontribusi dalam ekonomi dan segi sumbangan pendapatan perempuan perlu ditingkatkan lagi.
4. Perlunya dukungan dan kerjasama antara SOPD terkait dalam hal penyediaan Data.
5. Menambah jumlah tenaga profesional yang bersertifikat dengan melibatkan tenaga pendamping pada pelatihan dan uji kompetensi.
6. Meningkatkan kapasitas SDM melalui Capacity Building tentang pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
7. Menambah SDM pada layanan UPT yang sesuai standar.
8. Penambahan Anggaran baik dari APBD maupun DAK untuk : Upaya Pencegahan dengan melakukan Perumusan Kebijakan, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Sosialisasi serta Advokasi; penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelayanan serta Penjangkauan Kasus.
9. Peningkatan Kapasitas SDM pada Unit Layanan dengan mengadakan atau mengikutsertakan pada Pelatihan Bersertifikasi.
10. Pengajuan usulan bantuan berupa Torlin (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak dan Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kementerian PPPA RI kepada UPTD PPA di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum memiliki Torlin dan Molin dalam rangka mendukung pelayanan dan penjangkauan korban kekerasan di daerah.
11. Perlunya dukungan sosialisasi advokasi dan anggaran dalam pencapaian indikator.
12. Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus memerlukan koordinasi.

13. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah.
14. Perlunya advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak termasuk peningkatan, pemahaman tentang Hak Anak dalam lintas sektor terkait Gugus Tugas KLA.
15. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait klaster 1-5 dan Kelembagaan dalam pengumpulan data untuk penilaian Evaluasi KLA.
16. Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Penilaian Evaluasi KLA
17. Terlaksananya bimtek KHA bagi SDM disetiap klaster untuk kabupaten/kota
18. Bertambahnya SRA, RIRA, PRAP, RBRA, PISA dan PKA yang terstandardisasi.
19. Terlaksananya pelatihan 2P (Pelopor dan Pelapor) bagi Forum Anak
20. Terlaksananya pelatihan PATBM di kabupaten/kota sebagai bagian dari kelurahan/desa dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
21. Dukungan anggaran yang cukup dari pemerintah daerah kabupaten/kota guna pencapaian KLA
22. Perlu memperkuat UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Propinsi maupun kabupaten dan kota se Kalimantan Tengah, dalam sarana, prasarana dan tenaga yang berkompeten sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat maksimal. Perlu adanya Promosi dan informasi dalam menginformasikan telah adanya tempat Perlindungan perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, yang juga melakukan pelayanan via Hotline kepada Masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk capaian indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat diukur dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya.

Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memiliki capaian kinerja yang baik dengan rata-rata capaian kinerja 101,024% dari seluruh target yang telah ditetapkan.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, Dinas juga ada fungsi pelayanan yaitu pada Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 10 April 2025

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DINAS P3A-PPKB	
SEK/KABID	Sp
KA. SUB BAG/SEKSI	-
PELAKSANA	Sp

Mengetahui :

1. Kabid 1 : Sp
2. Kabid 2 : Sp
3. Kabid 3 : Sp
5. Kabid 4 : Sp
6. Kabid 5 : Sp
7. Kepala UPT PPA : Sp

Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memiliki capaian kinerja yang baik dengan rata-rata capaian kinerja 101,024% dari seluruh target yang telah ditetapkan.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, Dinas juga ada fungsi pelayanan yaitu pada Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 10 April 2025


KEPADA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DOKUMENTASI RAPAT TRIWULAN I

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamsno No. 11 Telp. 0536 - 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id

PALANGKA RAYA 73112

A. Target Realisasi Kinerja Tahunan

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data	Satuan	Target	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{[par + DM + (n - dst)]}{3}$	DINAS P3APPKB Kab/Kota, Se Kalimantan Tengah dan BPS	Indeks	81,96	81,96	81,96	81,96	81,96
2.	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	kabupaten/ kota—	DINAS P3APPKB Kab/Kota Se Kalimantan Tengah	kabupaten/ kota	14	0	4	8	14
3.	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$JKKLK = \frac{JKK}{JKK} \times 100 \%$	DINAS P3APPKB Kab/Kota Se Kalimantan Tengah	persen	100%	95%	96%	98%	100%
4.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai kluster = jlb nilai indikator kluster : jlh indikator. $IPA = \sum \text{nilai kluster} \times \text{bobot}$	DINAS P3APPKBSE- Kalimantan Tengah Badan Pusat Statistik, SAKERNAS, SUSENAS, BAPPENAS	indeks	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang mendapatkan Layanan Komprehensif	$PKKLK = \frac{JKKLK}{JKK} \times 100\%$	DINAS P3APPKBSE- Kalimantan Tengah Badan Pusat Statistik, SAKERNAS, SUSENAS, BAPPENAS	persen	65%	65%	65%	65%	65%

5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Formula Ibangga : Ibangga = $\frac{1}{3}$ (Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan) x 100	DP3APPKB Kab/Kota Sekalimantan Tengah dan BKKBN Perwakilan Provinsi Kalteng	persen	64,36%	64,36%	64,36%	64,36%	64,36%
		Angka Kelahiran Total/Total Vertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \times \sum_{i=15-19}^{45-49} SFR$	DP3APPKB Kab/Kota Sekalimantan Tengah dan BKKBN Perwakilan Provinsi Kalteng	Total Fertility Rate/ TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Dinas P3APPKB Se Kalimantan Tengah, Inspektorat, Biro Organisasi, Setda Prov.Kalteng	skor	BB	BB	BB	BB	BB

B. Target Realisasi Kinerja Triwulan I

No.	Sasaran strategis	Indikator KinerjaUtama	Satuan	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	81,96	81,96	79,99	97%
2.	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	kabupaten/ kota	14 Kab/kota	0	0	0
3.	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100%	95%	100%	105,26%
4.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	67,55	67,55	63,68	100%
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	65%	65%	65%	100%
5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (lbangga)	persen	64,36 %	64,36 %	62,55%	96,90 %
		Angka Kelahiran Total/Total Vertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/ TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	2,24	2,24	2,26	99,11
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	BB	BB	A	112,5%

C. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Rekening	Uraian	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				Total Realisasi	%	SISA ANGGARAN	%
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1				
		17.263.289.551,35	248.360.475,00	304.891.676,00	1.660.488.080,00	1.804.002.996,00	2.213.740.231,00	12,82%	15.049.549.320,35	87,18%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.263.289.551,35	248.360.475,00	304.891.676,00	1.660.488.080,00	1.804.002.996,00	2.213.740.231,00	12,82%	15.049.549.320,35	87,18%
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.728.239.977,35	248.360.475,00	304.891.676,00	1.660.488.080,00	1.804.002.996,00	2.213.740.231,00	13,23%	14.514.499.746,35	86,77%
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.130.252.102,35	248.360.475,00	304.891.676,00	1.553.311.530,00	1.804.002.996,00	2.106.563.681,00	14,91%	12.023.688.421,35	85,09%
2.08.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.501.248,67	-	-	13.769.900,00	13.769.900,00	13.769.900,00	6,03%	214.731.348,67	93,97%
2.08.01.101.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (22,153,700)	22.153.700,00	-	-	4.438.900,00	4.438.900,00	4.438.900,00	20,04%	17.714.800,00	79,96%
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.241.926,00			260.000	260.000	260.000,00	4,96%	4.981.926,00	95,04%
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16.911.774,00			4.178.900	4.178.900	4.178.900,00	24,71%	12.732.874,00	75,29%
2.08.01.101.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (20,000,000)	20.000.000,00	-	-	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00	19,74%	16.052.000,00	80,26%
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.593.000,00			3.948.000	3.948.000	3.948.000,00	70,59%	1.645.000,00	29,41%

5.1.2.01.0 1.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.407.000,00						-	0,00%		14.407.000,00	100,00%
2.08.01.1 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (21.135.246,67)	21.135.246,67	-	4.162.000,00	4.162.000,00			4.162.000,00	19,69%	4.162.000,00	16.973.246,67	80,31%
5.1.2.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.501.705,00				4.162.000	4.162.000	4.162.000,00	92,45%	4.162.000,00	339.705,00	7,55%
5.1.2.01.0 1.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.633.541,67						-	0,00%		16.633.541,67	100,00%
2.08.01.1 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (165.212.302)	165.212.302,00	-	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00		1.221.000,00	0,74%	1.221.000,00	163.991.302,00	99,26%
5.1.02.01. 01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.787.936,00				1.221.000	1.221.000	1.221.000,00	15,68%	1.221.000,00	6.566.936,00	84,32%
5.1.02.01. 01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.436.066,00						-	0,00%		13.436.066,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0029	Bahan Komputer	15.138.300,00						-	0,00%		15.138.300,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0043	Bahan Papan Natura	6.360.000,00						-	0,00%		6.360.000,00	100,00%
5.1.02.02. 01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.950.000,00						-	0,00%		13.950.000,00	100,00%
5.1.02.02. 04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00						-	0,00%		2.500.000,00	100,00%
5.1.02.04. 01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.040.000,00						-	0,00%		106.040.000,00	100,00%
2 . 08 . 01 . 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.450.363.034,00	248.360.475,00	248.360.475,00	1.288.227.146,00	1.784.948.096,00	1.784.948.096,00	1.784.948.096,00	18,89%	1.784.948.096,00	7.665.414.938,00	81,11%
2.08.01.1 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (9.409.336.769)	9.409.336.769,00	248.360.475,00	248.360.475,00	1.275.897.696,00	1.772.618.646,00	1.772.618.646,00	1.772.618.646,00	18,84%	1.772.618.646,00	7.636.718.123,00	81,16%
5.1.01.01. 01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.865.750.965,00	185.710.600	185.710.600	366.830.200	738.251.400	738.251.400	738.251.400,00	25,76%	738.251.400,00	2.127.499.565,00	74,24%
5.1.01.01. 01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	669.872.760,00						-	0,00%		669.872.760,00	100,00%
5.1.01.01.	Belanja Tunjangan								27,60%			72,40%

02.0001	Keluarga PNS	222.932.588,00	15.526.532	15.526.532	30.473.496	61.526.560	61.526.560,00		161.406.028,00		100,00%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	93.782.186,39				-	-	0,00%	93.782.186,39		100,00%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	331.915.500,00	13.230.000	13.230.000	25.200.000	51.660.000	51.660.000,00	15,56%	280.255.500,00		84,44%
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	-				-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	160.000.000,00	8.540.000	8.540.000	17.080.000	34.160.000	34.160.000,00	21,35%	125.840.000,00		78,65%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-				-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	160.000.000,00	4.420.000	4.420.000	8.840.000	17.680.000	17.680.000,00	11,05%	142.320.000,00		88,95%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	44.030.000,00				-	-	0,00%	44.030.000,00		100,00%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	153.614.900,00	9.052.500	9.052.500	17.887.740	35.992.740	35.992.740,00	23,43%	117.622.160,00		76,57%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	45.429.066,00				-	-	0,00%	45.429.066,00		100,00%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.343.020,00	998.423	998.423	14.774.981	16.771.827	16.771.827,00	33,32%	33.571.193,00		66,68%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	12.286.342,76				-	-	0,00%	12.286.342,76		100,00%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	186.795,00	2.512		5.359	10.383	10.383,00	5,56%	176.412,00		94,44%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	500.000,00				-	-	0,00%	500.000,00		100,00%
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	260.986.438,00	9.097.086	9.097.086	24.119.968	42.314.140	42.314.140,00	16,21%	218.672.298,00		83,79%
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	44.591.427,86				-	-	0,00%	44.591.427,86		100,00%
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.675.302,00	445.704		434.687	1.326.095	1.326.095,00	15,29%	7.349.207,00		84,71%
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.607.694,63				-	-	0,00%	1.607.694,63		100,00%
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.025.905,00	1.337.118	1.337.118	1.304.065	3.978.301	3.978.301,00	15,29%	22.047.604,00		84,71%
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.823.083,87				-	-	0,00%	4.823.083,87		100,00%
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	28.763.866,00				-	-	0,00%	28.763.866,00		100,00%

5.1.01.01.1 2.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	4.043.928,49						-	0,00%	4.043.928,49	100,00%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.738.175.000,00						-	0,00%	3.738.175.000,00	100,00%
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	306.000.000,00					738.947.200	738.947.200,00	241,49%	- 432.947.200,00	-141,49%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	140.000.000,00					30.000.000	30.000.000,00	21,43%	110.000.000,00	78,57%
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	35.000.000,00					-	-	0,00%	35.000.000,00	100,00%
2.08.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (5.161.500)	5.161.500,00	-				5.160.450,00	5.160.450,00	99,98%	1.050,00	0,02%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.408.977,00					1.407.950	1.407.950,00	99,93%	967,00	0,07%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.752.583,00					3.752.500	3.752.500,00	100,00%	83,00	0,00%
2.08.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (35.864.765)	35.864.765,00	-				7.169.000,00	7.169.000,00	19,99%	28.695.765,00	80,01%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.302.635,00					5.400.000	5.400.000,00	73,95%	1.902.635,00	26,05%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15.314.130,00					1.769.000	1.769.000,00	11,55%	13.545.130,00	88,45%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	13.248.000,00					-	-	0,00%	13.248.000,00	100,00%
2.08.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.488.400,00	-				2.598.500,00	2.598.500,00	11,06%	20.889.900,00	88,94%
2.08.01.1	Pengamanan Barang								11,06%		88,94%

03.02	Milik Daerah SKPD (23,488,400)	23.488.400,00	-	-	2.598.500,00	2.598.500,00	2.598.500,00			20.889.900,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.101.264,00			-	-	-	0,00%	0,00%	9.101.264,00	100,00%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.788.636,00			-	-	-	0,00%	0,00%	11.788.636,00	100,00%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00			1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00%	100,00%	-	0,00%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	1.298.500,00			1.298.500	1.298.500	1.298.500	100,00%	100,00%	-	0,00%
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	36.000.000,00	100,00%
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (36,000,000)	36.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	36.000.000,00	100,00%
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00			-	-	-	0,00%	0,00%	36.000.000,00	100,00%
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.069.082.911,68	-	-	27.540.730,00	27.540.730,00	27.540.730,00	2,58%	2,58%	1.041.542.181,68	97,42%
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (22,295,000)	22.295.000,00	-	-	2.686.500,00	2.686.500,00	2.686.500,00	12,05%	12,05%	19.608.500,00	87,95%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.295.000,00			2.686.500	2.686.500	2.686.500,00	12,05%	12,05%	19.608.500,00	87,95%
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (355,167,000)	355.167.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	355.167.000,00	100,00%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	91.246.315,00			-	-	-	0,00%	0,00%	91.246.315,00	100,00%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	46.948.817,00			-	-	-	0,00%	0,00%	46.948.817,00	100,00%
5.1.02.01.	Belanja Alat/Bahan							0,00%	0,00%		100,00%

01.0029	untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.111.710,00	-	-	-	-	-	-	-	15.111.710,00		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	177.860.158,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	177.860.158,00	100,00%	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	24.000.000,00	100,00%	
2.08.011.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (52.600.000)	52.600.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	52.600.000,00	100,00%	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.357.300,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	10.357.300,00	100,00%	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	42.242.700,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	42.242.700,00	100,00%	
2.08.011.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (0)	-	-	-	-	-	-	-		-		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-		-		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	-	-	-	-	-		-		
2.08.011.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (28.636.894,20)	28.636.894,20	-	-	-	-	-	-	0,00%	28.636.894,20	100,00%	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	314.332,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	314.332,00	100,00%	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.722.668,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	3.722.668,00	100,00%	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.599.894,20	-	-	-	-	-	-	0,00%	24.599.894,20	100,00%	
2.08.011.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (515.359.417,48)	515.359.417,48	-	-	24.854.230,00	-	-	-	4,82%	490.505.187,48	95,18%	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.926.000,00	-	-	3.922.700	-	-	-	99,92%	3.300,00	0,08%	
5.1.02.02.	Honorarium Narasumber		-	-	-	-	-	-	0,00%		100,00%	

01.0003	atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.400.000,00							-				15.400.000,00			
5.1.02.02. 01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00							-				1.750.000,00	0,00%		100,00%
5.1.02.02. 01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	3.600.000,00							-				3.600.000,00	0,00%		100,00%
5.1.02.04. 01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	490.683.417,48											469.751.887,48	4,27%	20.931.530,00	95,73%
5.1.02.04. 01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-							-				-			
2.08.01.1. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (95.024.600)	95.024.600,00	-						-				95.024.600,00	0,00%		100,00%
5.1.02.01. 01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.424.600,00							-				2.424.600,00	0,00%		100,00%
5.1.02.01. 01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00							-				600.000,00	0,00%		100,00%
5.1.02.02. 01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	33.000.000,00							-				33.000.000,00	0,00%		100,00%
5.1.02.02. 01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	59.000.000,00							-				59.000.000,00	0,00%		100,00%
2.08. 01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.415.000,00	-						-				1.038.415.000,00	0,00%		100,00%
2.08.01.1. 07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (871.015.000)	871.015.000,00	-						-				871.015.000,00	0,00%		100,00%
5.1.02.01. 01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.915.000,00							-				1.915.000,00	0,00%		100,00%
5.1.02.01. 01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.200.000,00							-				1.200.000,00	0,00%		100,00%

5.1.02.03. 02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga--Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.900.000,00						-	0,00%	22.900.000,00	100,00%
5.2.02.02 .01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	845.000.000,00						-	0,00%	845.000.000,00	100,00%
2.08.01.1 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya (167.400.000)	167.400.000,00						-	0,00%	167.400.000,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00						-	0,00%	800.000,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00						-	0,00%	600.000,00	100,00%
5.1.02.02. 08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya	16.000.000,00						-	0,00%	16.000.000,00	100,00%
5.1.02.02. 08.0018	Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur	14.000.000,00						-	0,00%	14.000.000,00	100,00%
5.2.03.01. 01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	136.000.000,00						-	0,00%	136.000.000,00	100,00%
2 . 08 . 01 . 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.876.627.608,00	-	56.531.201,00	205.010.354,00	-		261.541.555,00	13,94%	1.615.086.053,00	86,06%
2.08.01.1 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (11.248.700)	11.248.700,00	-		2.900.900,00	-		2.900.900,00	25,79%	8.347.800,00	74,21%
5.1.02.01. 01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.401.060,00						1.400.900	99,99%	160,00	0,01%
5.1.02.01. 01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.197.640,00						-	0,00%	2.197.640,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.650.000,00						1.500.000	19,61%	6.150.000,00	80,39%
2.08.01.1 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (246.367,908)	246.367.908,00	-		28.690.973,00	-		28.690.973,00	11,65%	217.676.935,00	88,35%
5.1.02.02. 01.0061	Belanja Tagihan Listrik	246.367.908,00						28.690.973	11,65%	217.676.935,00	88,35%

2.08.01.1 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.619.011.000)	1.619.011.000,00	-	56.531.201,00	173.418.481,00	-	229.949.682,00	14,20%	1.389.061.318,00	85,80%
5.1.02.01. 01.0002	Belanja Bahan- Bahan Kimia	2.404.080,00					-	0,00%	2.404.080,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	61.487.450,00					-	0,00%	61.487.450,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	74.575.378,00					-	0,00%	74.575.378,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	90.000.000,00					-	0,00%	90.000.000,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.750.000,00					-	0,00%	29.750.000,00	100,00%
5.1.02.02. 01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	15.000.000,00					-	0,00%	15.000.000,00	100,00%
5.1.02.02. 01.0025	Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	45.000.000,00					-	0,00%	45.000.000,00	100,00%
5.1.02.02. 01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	275.820.000,00	54.100.000	108.200.000			162.300.000,00	58,84%	113.520.000,00	41,16%
5.1.02.02. 01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	298.189.944,00					-	0,00%	298.189.944,00	100,00%
5.1.02.02. 01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	99.396.648,00					-	0,00%	99.396.648,00	100,00%
5.1.02.02. 01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	336.200.000,00					-	0,00%	336.200.000,00	100,00%
5.1.02.02. 01.0080	Belanja Honorarium Pangungjawaban Pengelola Keuangan	278.640.000,00			60.300.000		60.300.000,00	21,64%	218.340.000,00	78,36%
5.1.02.02. 02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.032.800,00	2.164.000		4.328.000		6.492.000,00	58,84%	4.540.800,00	41,16%
5.1.02.02. 02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	673.200,00	104.436		262.716		367.152,00	54,54%	306.048,00	45,46%
5.1.02.02. 02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	841.500,00	162.765		327.765		490.530,00	58,29%	350.970,00	41,71%

2.08.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.773.900,00	-	-	-	16.164.900,00	-	16.164.900,00	3,96%	391.609.000,00	96,04%
2.08.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (142.296.400)	142.296.400,00	-	-	-	14.979.900,00	-	14.979.900,00	10,53%	127.316.500,00	89,47%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.280.900,00				8.480.300		8.480.300,00	9,72%	78.800.600,00	90,28%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.965.500,00				6.499.600		6.499.600,00	40,71%	9.465.900,00	59,29%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.050.000,00				-		-	0,00%	39.050.000,00	100,00%
2.08.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (50.735.200)	50.735.200,00	-	-	-	1.185.000,00	-	1.185.000,00	2,34%	49.550.200,00	97,66%
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	50.735.200,00				1.185.000		1.185.000,00	2,34%	49.550.200,00	97,66%
2.08.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (214.742.300)	214.742.300,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	214.742.300,00	100,00%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.000.000,00				-		-	0,00%	3.000.000,00	100,00%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00				-		-	0,00%	600.000,00	100,00%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	211.142.300,00				-		-	0,00%	211.142.300,00	100,00%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	949.722.360,02	-	-	-	19.385.000,00	-	19.385.000,00	2,04%	930.337.360,02	97,96%

[illegible]

[illegible]

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.207.753,00							-	0,00%	2.207.753,00	100,00%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.471.742,00						999.900	999.900,00	22,36%	3.471.842,00	77,64%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	576.000,00						576.000	576.000,00	100,00%	-	0,00%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.780.000,00							-	0,00%	3.780.000,00	100,00%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.200.000,00							-	0,00%	16.200.000,00	100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.286.000,00						8.660.000	8.660.000,00	20,98%	32.626.000,00	79,02%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00							-	0,00%	8.400.000,00	100,00%
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	226.641.000,00	-	-			27.231.500,00		27.231.500,00	12,02%	199.409.500,00	87,98%
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (86.000.000)	86.000.000,00	-	-			9.796.100,00		9.796.100,00	11,39%	76.203.900,00	88,61%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan -Bahan Bakar dan Pelumas	6.750.000,00						1.300.000	1.300.000,00	19,26%	5.450.000,00	80,74%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.480.326,00						995.000	995.000,00	15,35%	5.485.326,00	84,65%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.298.357,00						2.961.400	2.961.400,00	19,36%	12.336.957,00	80,64%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.653.557,00						300.000	300.000,00	2,37%	12.353.557,00	97,63%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	3.835.150,00							-	0,00%	3.835.150,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

01.0024	untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.772.928,00							-				2.772.928,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.765.165,00							-				14.765.165,00	0,00%	100,00%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	742.000,00							-				742.000,00	0,00%	100,00%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00							-				825.000,00	0,00%	100,00%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.200.000,00							-				27.200.000,00	0,00%	100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.064.000,00							-				27.064.000,00	0,00%	100,00%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	288.313.810,00	-					4.147.250,00	-				284.166.560,00	1,44%	98,56%
2.08.06.1.01	Pelenggaraan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	103.527.361,00	-					4.147.250,00	-				99.380.111,00	4,01%	95,99%
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (25.742.995)	25.742.995,00	-					4.147.250,00	-				21.595.745,00	16,11%	83,89%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.925.129,00						1.921.250					3.879,00	99,80%	0,20%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.922.722,00						630.000					1.292.722,00	32,77%	67,23%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.607.144,00						1.596.000					11.144,00	99,31%	0,69%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.288.000,00											20.288.000,00	0,00%	100,00%
2.08.06.1.01.003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	77.784.366,00	-						-				77.784.366,00	0,00%	100,00%

[illegible]

01.0043	Pakan-Natura	1.590.000,00								-								1.590.000,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.615.000,00								-								35.615.000,00	0,00%				100,00%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.300.000,00								-								13.300.000,00	0,00%				100,00%
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00								-								5.000.000,00	0,00%				100,00%
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.570.000,00								-								20.570.000,00	0,00%				100,00%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00								-								3.000.000,00	0,00%				100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.520.000,00								-								33.520.000,00	0,00%				100,00%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00								-								14.000.000,00	0,00%				100,00%
2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (44,093,209)	44.093.209,00								-								44.093.209,00	0,00%				100,00%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.536.794,00								-								2.536.794,00	0,00%				100,00%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.310.415,00								-								1.310.415,00	0,00%				100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.246.000,00								-								40.246.000,00	0,00%				100,00%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	793.399.570,98	-							46.176.900,00								793.399.570,98	5,82%				94,18%
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	314.766.070,98	-							-								314.766.070,98	0,00%				100,00%
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi (DAK)	112.126.000,00	-							-								112.126.000,00	0,00%				100,00%

[illegible]

[illegible]

2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	34.807.869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	34.807.869,00	100,00%
2.14.02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	34.807.869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	34.807.869,00	100,00%
2.14.02.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (34.807.869)	34.807.869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	34.807.869,00	100,00%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.261.235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	2.261.235,00	100,00%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.391.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	5.391.634,00	100,00%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.350.000,00	100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.805.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	25.805.000,00	100,00%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	218.813.277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	218.813.277,00	100,00%
2.14.03.01	Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	200.000.000,00	100,00%
2.14.03.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (200.000.000)	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	200.000.000,00	100,00%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	84.000.000,00	100,00%

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	50.000.000,00	100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	30.000.000,00	100,00%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	36.000.000,00	100,00%
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	18.813.277,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	18.813.277,00	100,00%
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB		-	-	-	-	-	-	-			
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana (18.813.277)	18.813.277,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	18.813.277,00	100,00%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.166.014,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.166.014,00	100,00%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.499.263,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.499.263,00	100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.148.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	16.148.000,00	100,00%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	281.428.428,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	281.428.428,00	100,00%
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	281.428.428,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	281.428.428,00	100,00%
2.14.04.1.01007	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (281.428.428.)	281.428.428,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	281.428.428,00	100,00%

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	26.084.796,00							-	0,00%	26.084.796,00	100,00%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	18.701.632,00							-	0,00%	18.701.632,00	100,00%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00							-	0,00%	5.400.000,00	100,00%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.000.000,00							-	0,00%	16.000.000,00	100,00%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00							-	0,00%	4.500.000,00	100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	182.742.000,00							-	0,00%	182.742.000,00	100,00%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.000.000,00							-	0,00%	28.000.000,00	100,00%

Palangka Raya, 10 April 2025
KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Mengetahui

1. Kabid 1

2. Kabid 2

3. Kabid 3

4. Kabid 4

5. Kabid 5

6. Kepala UPT PPA

DINAS P3A-PPKB

SEKKABID

KA. SUB BAG/SEKSI

PELAKSANA

dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

5.1.02.01. 01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	26.084.796,00							0,00%	26.084.796,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	18.701.632,00							0,00%	18.701.632,00	100,00%
5.1.02.01. 01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00							0,00%	5.400.000,00	100,00%
5.1.02.02. 01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.000.000,00							0,00%	16.000.000,00	100,00%
5.1.02.02. 05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00							0,00%	4.500.000,00	100,00%
5.1.02.04. 01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	182.742.000,00							0,00%	182.742.000,00	100,00%
5.1.02.04. 01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.000.000,00							0,00%	28.000.000,00	100,00%

Palangka Raya, 10 April 2025

KEPANTUAAN DINAS P6APPKB

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINA E. VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19680717 199903 2 006